

**EFEKTIFITAS STRATEGI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM MENGUASAI
LAUT CHINA SELATAN PASCA PUTUSAN BADAN
ARBITRASE INTERNASIONAL 2016**

Oleh:

**Hendy Rizal Muhammad¹
(hendyrizal44@gmail.com)**

Pembimbing : Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Bibliografi : 19 Jurnal dan Paper Ilmiah, 10 Buku, 20 Website, 1 Dokumen Penting

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-
63277

Abstract

This research explains the Chinese strategy ineffectiveness to dominate the South China Sea post Permanent Court Arbitration in 2016. The Court declined the China's nine dash line claim and decided to accept Philipine's claim on the region dispute. This research also explores the Chinese strategy to dominate the South China Sea which militarily speaks louder regarding to its massive military power development and its huge number of economic power especially since 1990s.

The research applies two approach which are balance of power and maritime security approach. The maritime security approach consists of two aspects: maritime security regime and maritime security community. The maritime security approach is used to explain the South China Sea regional security complexity. The strategy theory is used to explain China's strategy to dominate the South China Sea. This research is developed by qualitative methods with library studies technique.

The result of this research shows that South China Sea regional security problem complexity has caused China's strategy became ineffective. These complexity consists of China's aggressiveness in the region, the internal and external balance of power in the region, and security dilemma in the South China Sea. These complexity have made China's strategy became ineffective.

Key Words: China, South China Sea, Permanent Court Arbitration, Ineffective Strategy, Security Complexity, Balance of Power, and Security Dilemma.

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2011

I. Pendahuluan

Penelitian ini akan menganalisis tidak efektifnya strategi Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan setelah adanya putusan Arbitrase Internasional. Tiongkok mempunyai wilayah klaim dengan berpedoman pada peta *Nine Dash Line* di tahun 1947 yang mengklaim lebih dari 100 pulau, atoll dan gugusan karang². Setelah perjanjian UNCLOS (*The United Nation Convension on the Law of the Sea*) yang mengatur perjanjian tentang batas territorial wilayah laut suatu negara, maka Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, Brunai Darussalam, Taiwan, Malaysia dan Vietnam saling mengklaim wilayah Laut China Selatan. Klaim tersebut menjadi isu yang hangat sampai sekarang karna masing-masing negara mengklaim wilayah tersebut. Penelitian ini difokuskan kepada tindakan apa saja yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan.

Aktifitas Tiongkok yang semakin massif memperlihatkan agresifitasnya di wilayah Laut China Selatan ditenggarai sebagai usaha yang konsisten dari Tiongkok untuk membangun kekuatannya militernya. Padahal Tiongkok sempat menyebut dirinya sebagai "Saudara Tua" bagi negara-negara Asia Tenggara dan berjanji akan bersama-sama membangun Asia, akan tetapi Tiongkok terlibat konflik dengan negara-negara Asia Tenggara Lainnya. Dengan kekuatan militer yg mumpuni, negara-negara Asia tidak akan mampu membuka konflik terbuka dengan Tiongkok. Walaupun sempat terjadi ketegangan dan

serangan militer pada tahun 1980-an antara Tiongkok dan Vietnam memperebutkan gugusan karang *Johnson reefs*.³

Tiongkok sebagai kekuatan baru dan mempunyai kepentingan yang besar juga di kawasan Asia Tenggara memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan di Asia, tentu harus mampu mengatasi konflik di wilayah Laut China Selatan dan mampu mengurangi pengaruh Amerika yang sudah kuat di kawasan Asia Tenggara. Amerika sebagai sekutu dari beberapa negara di Asia Tenggara dan mempunyai pangkalan militer juga di Filipina, ikut ambil bagian dengan ikut berpatroli di wilayah Laut China Selatan dan sempat menimbulkan ketegangan dengan Tiongkok, Amerika yang melakukan patroli berangkat dari pangkalan militernya di Guam beberapa kali terlibat ketegangan dengan Tiongkok baik itu menggunakan pesawat terbang ataupun kapal laut destroyer USS Lassen.⁴

Beberapa alasan Tiongkok ingin menguasai keseluruhan Laut China Selatan adalah daerah tersebut kaya akan hasil minyak dan gas bumi, selain itu Laut China Selatan juga merupakan jalur perdagangan yang padat dilalui berbagai macam negara-negara di dunia. Dengan adanya upaya-upaya untuk meminimalisir pergerakan Tiongkok di Laut China Selatan, ini akan membuat Tiongkok tidak akan bisa menjadi negara *Superpower* dan tidak akan bisa menguasai Laut China Selatan sepenuhnya.

Tiongkok sebagai aktor keamanan global aktif dalam program *peacekeeping* PBB di daerah-daerah konflik. Selain itu,

²<http://www.smh.com.au/world/south-China-sea-dispute-updates-20150520-gh5kd4.html> diakses pada tanggal 1 agustus 2016 pukul 16.30 wib

³<http://www.theguardian.com/world/2015/jul/28/what-s-behind-beijings-drive-control-south-China-sea-hainan> diakses pada tanggal 1 agustus 2016 pukul 17.00 wib

⁴<http://www.wsj.com/articles/u-s-military-aircraft-flew-close-to-chinese-built-artificial-islands-1447389444> diakses pada tanggal 1 agustus 2016 pukul 17.30 wib

Tiongkok juga memiliki hubungan yang kompleks dengan Amerika Serikat yang memiliki kebijakan yang secara langsung memicu konfrontasi dengan Tiongkok (*U.S. Pivot to Asia*). Meskipun secara militer mereka bersaing, namun secara ekonomi, Amerika Serikat dan Tiongkok terlibat dalam hubungan ekonomi yang sifatnya interdependen. Namun tetap saja Tiongkok adalah *serious concern* bagi *big powers* yang lain. Eropa dan Amerika Serikat terus berusaha mendorong Tiongkok untuk lebih fokus kepada keamanan global dibandingkan dengan terus transparan terhadap modernisasi militernya yang terus memicu kekhawatiran yang serius dari negara-negara lain baik di kawasan maupun internasional.⁵Tiongkok dan Eropa dapat bekerjasama berdasarkan dengan pernyataan Barones Cathrine Ashton sebagai *High Representative for Foreign and Security Policy* Uni Eropa, bahwa Eropa dan Tiongkok adalah partner strategis.

Pada tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktifitas Tiongkok di Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag, Belanda. Filipina menuding Tiongkok mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Pengajuan kasus di Mahkamah Arbitrase ini sejatinya mempertanyakan kepada Mahkamah Arbitrase apa saja unsur daratan di Laut China Selatan. Imbasnya, negara-negara di kawasan Laut China Selatan dapat mengetahui seberapa besar klaim wilayah mereka di kawasan tersebut.

Badan Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration*) pada 12 Juli 2016 lalu didukung Persatuan Bangsa-

Bangsa menyatakan bahwa Tiongkok telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan. Keputusan ini berdampak positif bagi negara-negara yang berada di daerah perairan Laut China Selatan.

Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu landasan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Landasan berpikir inilah yang akan penulis gunakan dalam menganalisa suatu fenomena yang patut untuk diteliti. Dalam membahas sebuah kasus penulis harus memiliki teori dan perspektif yang jelas. Dengan demikian penulis merasa perlu untuk mengemukakan teori dan perspektif yang dipakai, serta konsep dari penelitian ini.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. **Pertama, *Balance of Power***. Perimbangan kekuatan antar negara-negara pengklaim merupakan peningkatan kapasitas militer masing-masing negara untuk menyiapkan diri menghadapi konfrontasi militer langsung (perang) yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Tentunya skenario ini tidak diinginkan oleh ASEAN baik negara-negara anggotanya maupun ASEAN sebagai sebuah entitas kesatuan regional. Konfrontasi akan menimbulkan banyak kerugian dan pastinya mengancam terjadinya perang yang lebih besar dan berkepanjangan.

Pendekatan yang **kedua, *Maritime Security***. ASEAN bisa menggunakan pendekatan Keamanan Maritim dalam menghadapi isu Laut China Selatan. Pendekatan ini memiliki dua mekanisme yaitu: yang pertama adalah *Maritime Security Community* dengan membentuk

⁵Kaldor, Mary & Rangelov. 2014. *The Handbook of Global Security Policy* (ed.). New Jersey: John Wiley & Sons. Hal.380

fungsi-fungsi institusional seperti *Confidence Building Measures* menempatkan Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan bersama dan yang kedua adalah *Maritime Security Regime* dengan membentuk aturan-aturan terkait lalu lintas bersama dan manajemen bencana.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi. Strategi merupakan kemampuan untuk menggunakan kekuatan sebagai alat dan sebagai ancaman. Strategi dalam artian luas dapat diartikan sebagai “*the art of science of shaping means so as to promote ends in any of conflict*”. Dalam kajian strategi, *the art to be shaping* adalah militer, *the field of conflict* adalah sistem internasional, dan *ends* adalah tujuan politik aktor yang cukup luas dan menunjukkan adanya konteks internasional.⁶

Level analisis yang penulis gunakan adalah Sistem Internasional yang ditelaah untuk kasus Laut China Selatan. Ada beberapa tingkat analisa yang ditawarkan oleh sarjana-sarjana Hubungan Internasional, K.J. Holsti menawarkan empat tingkat analisa utama, yakni individu, negara, sistem negara dan sistem internasional.⁷ Sedangkan Dougherty dan Pfaltzgraff menyebutkan lebih banyak lagi tingkat analisa yang bisa digunakan untuk penelitian HI, yakni tingkat analisa individu, tingkat analisa kelompok-kelompok subnasional, tingkat analisa negara bangsa, tingkat analisa kelompok transnasional dan organisasi yang tidak mewakili negara, tingkat analisa kelompok internasional dan organisasi dengan negara atau perwakilannya sebagai anggota, dan

terakhir adalah tingkat analisa sistem internasional.

Penulis menggunakan tingkat analisis sistem internasional dalam penelitian ini. Sistem analisis merupakan sebuah pendekatan *top-down* untuk mempelajari politik dunia.⁸ Karl Deutsch mendefinisikan komunitas keamanan adalah sebuah kelompok yang “telah terintegrasi”, dimana integrasi didefinisikan sebagai sebuah pencapaian sebuah *sense of community*, disertai dengan institusi atau pelaksanaan formal atau informal, cukup kuat dan tersebar luas untuk memastikan perubahan damai di antara anggota kelompok dengan kepastian yang “layak” diatas ‘jangka waktu yang panjang’.⁹ Komunitas keamanan dapat dibagi dalam dua jenis, ‘*amalgamated*’ lewat merger politik formal dan ‘pluralistik’ lewat integrasi antara entitas yang independen. ASEAN adalah komunitas keamanan yang pluralistik karena masing-masing anggotanya adalah negara yang independen dan memiliki pemerintahan sendiri. Tiongkok juga harus menghormati konstelasi politik internasional yang ada. Semua tahu bahwa Tiongkok *militarily speaks louder than others*, namun Tiongkok juga harus menyadari dan menghormati ASEAN sebagai salah satu mitra terbesar Tiongkok di bidang ekonomi. Tiongkok perlu menyadari dan menghormati bahwa *self-constraint* dan *trust* harus ditunjukkan oleh negara yang lebih besar.

II. Isi

⁶Rendi Preyudha & Syafri Harto. Jurnal transasional (2012). *Strategi Indonesia menghadapi kebijakan Malaysia di Wilayah Perbatasan Tahun 2006-2010*. Hal. 706

⁷K.J. Holsti. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis: Sixth Edition*, New Jersey: Prentice-Hall International Editions. Hal. 6.

⁸Rourke. 2003. *International Politics on the World Stage*. New York: McGraw-Hill/Dushkin. Hal. 54.

⁹Amitav Acharya. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge. Hlm. 16

Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km².¹⁰ Berdasarkan ukurannya, Laut China Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera. Laut China Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga perannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.

Menurut Internasional Hydrography Organisation (IHO) letak geografis Laut China Selatan sebagai berikut: (Limits of Oceans and Seas by Internasional Hydrographic Organization 3. Edition 1953). Di bagian selatan, garis batas Laut China Selatan mulaidari batas wilayah selatan Singapura dan batastimur Selat Malaka (1°22"LU 104°17"BT – 1.367°LU 104.283°-BT) menyusurisepanjang pantai timur Sumatra ke Pulau Koko di timur laut Pulau Bintan (1°13.5"LU 104°35"BT – 1.225°LU 104.583° BT) hingga ke batas Tanjung Djemang di Pulau Belitung (2°36"LS 107°37"BT – 2.6°LS 107.617°BT) menuju Tanjung Boeroeng Mandi (2°46"LS 108°16"BT – 2.767°LS 108.267°BT) dan kemudian menuju ke batas Tanjung Sambarbarat daya Pulau Kalimantan (3°11'00"LU 110°00'BT – 3°LS 110,317°BT).

Kawasan Laut China Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis sehingga

menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi untuk bekerja sama. Dengan kata lain, kawasan Laut China Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta perannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Menurut penelitian yang diadakan oleh *The Committee for Coordination of Joint Prospecting For Mineral Resources In Asian offshore Areas, Economic Commission for Asia and The Far East*, sejak dasawarsa 1960-an telah ditemukan mineral potensial terutama minyak dan gas.¹¹ Selain kandungan minyak dan gas, Laut China Selatan juga berpotensi besar akan variasi jenis ikan. Letak geografi laut yang berdekatan dengan beberapa selat memungkinkan migrasi ikan-ikan dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) satu ke ZEE lainnya.

Penemuan minyak bumi dan gas pertama di kepulauan *Spartly* ada pada tahun 1968. Menurut data dari *The Geology and Mineral Resources Ministry of the People's Republic of Tiongkok (RRC)* memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan ini mencapai 17,7 miliar ton.¹² Beberapa negara maju sangat membutuhkan kawasan ini salah satunya adalah Amerika Serikat.

Amerika Serikat melalui jalur ini guna untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai tingkat kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan

¹⁰www.anneahira.com, **Laut Cina Selatan**, 2011, diakses tanggal 24 Mei 2016

¹¹Setyaningsih Aryani, *Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China*

Selatan, <https://sidos.unisri.ac.id/publikasi/69Jurnal%20China>, diakses terakhir pada 13 September 2016

¹²<http://militaryanalysisonline.com/> diakses pada tanggal 24 mei 2015

Laut China Selatan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perebutan banyak negara.¹³ Dengan arti strategis dan ekonomis yang demikian, maka kawasan ini berpotensi mengundang konflik.¹⁴ Sebuah perairan dengan potensi kandungan minyak gas dan alam yang tinggi juga perannya yang penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat Laut China Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks Regional dan Internasional.

Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan (*South China Sea*, atau *SCS*) ini diawali oleh klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas Kepulauan Sparty dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Sparty, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut.¹⁵ Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut Cina Selatan, utamanya negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Adapun negara-negara tersebut antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.¹⁶

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi Tiongkok untuk mempertahankan klaimnya atas

kepemilikan Laut China Selatan. Hal ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan *show of force*, yang cenderung menunjukkan kekuatannya melalui aksi provokatif terhadap negara-negara pengklaim lainnya. Seperti terlihat dalam kebijakannya sejak tahun 1974 hingga sekarang Tiongkok secara intensif telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Laut Cina Selatan guna mempertahankan sumber-sumber potensial barunya yang dapat mendukung kepentingan nasionalnya.¹⁷

Strategi dan Agresivitas Tiongkok yang Ingin Menguasai Laut China Selatan

Laut China Selatan adalah zona penyangga untuk daratan Tiongkok selatan. Kontrol Tiongkok terhadap wilayah tersebut akan memungkinkannya untuk menciptakan penghalang militer yang dapat menantang ancaman militer di masa depan. Misalnya, setiap blokade perdagangan, oleh negara bagian atau koalisi negara, melawan Tiongkok hanya bisa dicapai melalui dominasi Laut China Selatan. Kontrol Tiongkok di wilayah tersebut akan memungkinkannya membangun dan mengembangkan pangkalan militer yang dapat diproyeksikannya melawan saingan regional dan eksternal seperti AS. Hal ini sangat penting, Negara-negara yang telah mengajukan klaim teritorial atas Laut China Selatan. Kehadiran militer Tiongkok yang signifikan di Laut China Selatan, yang

¹³www.eia.gov, *US Energy Information and Administration, South China Sea*, 2008, diakses tanggal 24 Mei 2016.

¹⁴www.foreignpolicy.com, Robert D Kaplan, *The South China Sea Is the Future of Conflict*, diakses tanggal 24 Mei 2016.

¹⁵Evelyn Goh, (*Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, 2005*), *East-West Center Washington*, Hal. 31.

¹⁶<http://www.eastasiaforum.org>/2011/06/29/china-s-militant-tactics-in-the-south-china-sea/, diakses tanggal 15 Januari 2015

¹⁷Setyasih Harini (Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan: artikel Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unsri Surakarta, 2015), Hal. 4.

memiliki kemampuan militer yang besar, memiliki peran untuk menolak akses ke daerah tersebut terhadap musuh potensial dan akan mengecilkan aktivitas militer masa depan yang ditujukan ke Tiongkok. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pencegahan adalah ujung militer utama dalam Strategi Tiongkok di Laut China Selatan.¹⁸

Berikut merupakan strategi Tiongkok di Laut China Selatan untuk mencapai tujuan:

1. Modernisasi dan perluasan PLA, khususnya PLA laut, serta pengembangan dan perluasan kapasitas pasukan paramiliter lainnya.
2. Tiongkok telah menghindari pendekatan multilateral, namun berfokus pada negosiasi dan dialog bilateral saat mengelola wilayah dan perairan yang disengketakan di Laut China Selatan.¹⁹
3. Tiongkok telah berusaha untuk menggerakkan kawasan ini agar lebih terintegrasi secara ekonomi, dengan kekuatan geo-ekonomi China yang luar biasa di tengah jaringan perdagangan yang berkembang dan tumpang tindih ini.²⁰
4. Penciptaan garis sembilan, sebagai basis historis klaim kedaulatannya di Laut China Selatan, sebagai alat untuk memaksa para Negara untuk menerima batas-batas yang diamanatkan Beijing.

Tiongkok juga menggunakan sarana diplomatik, militer, dan ekonomi untuk mencapai tujuan strategis di Laut China Selatan. Tiongkok menggunakan kekuatan

diplomatik di Laut China Selatan untuk mencapai aspirasi strategis. Secara aktif membatasi diskusi mengenai wilayah-wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan dalam kerangka kerja bilateral dan menghindari dialog multilateral. Pendekatan semacam ini akan menjadi masalah bagi Tiongkok untuk memerangi negara-negara yang memiliki klaim teritorial terhadap Laut China Selatan. Dengan demikian, Tiongkok selalu menyoroti bahwa perselisihan teritorial semacam itu akan dikelola dengan lebih baik dan diselesaikan secara lebih efektif secara bilateral dan bahwa diskusi semacam itu tidak pantas diperdebatkan di antara organisasi regional seperti Forum Regional ASEAN atau KTT ASEAN.²¹

Kesimpulan

Kompleksitas yang tinggi di kawasan Laut China Selatan ini di- antaranya adalah adanya perimbangan kekuatan baik internal maupun eksternal, dilema keamanan di kawasan Laut China Selatan dan evolusi sistem persenjataan negara-negara di Kawasan Laut China Selatan. Bukti paling kuat adalah sampai sekarang Tiongkok tidak meningkatkan gelar kekuatannya ke arah preemptive, okupasi, atau serangan terhadap daerah sengketa. Ini terbukti bahwa kompleksitas itu menekan agresifitas dan efektifitas Tiongkok di kawasan Laut China Selatan.

Tiongkok telah memanfaatkan ikatan ekonomi dan perdagangannya sebagai alat yang efektif untuk kebijakan luar negeri dan diplomasi. Tiongkok juga telah meningkatkan investasi dan melakukan

¹⁸ STRATEGIC ANALYSIS, *A strategic analysis of the South China Sea territorial issues*, Jurnal, hal. 2

¹⁹ David A. Welch, *The diplomat, China's curious South China Sea negotiation policy*, <http://thediplomat.com/2016/06/chinas-curious-south-china-sea-negotiation-policy/>, (accessed August 29, 2016), Akses 24 April 2017

²⁰ Sarah Raine and Christian Le Miere, *Regional Disorder: the South China Sea Dispute*, *The International Institution for Strategic Studies*, The United Kingdom, London: Routledge 2013, h. 55

²¹ *Ibid*

perdagangan dengan negara-negara di kawasan dengan bantuan dan investasi, hal semacam itu dapat digunakan baik sebagai hukuman maupun penghargaan atau sebagai alat tawar menawar ketika berhadapan dengan sengketa teritorial Laut China Selatan. Untuk Contohnya, Tiongkok telah menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan *leverage* ekonominya. Saat perselisihan antara Tiongkok Dan Filipina mencapai tingkat yang tinggi di atas salah satu terumbu karang yang dipersengketakan, Tiongkok memberlakukannya Pembatasan impor barang buah dari Filipina.

Tiongkok memiliki personil militer aktif berjumlah 2.285.000 orang, sedangkan tentara cadangannya mencapai 510.000 orang dan paramiliter aktif sebanyak 660.000 orang. Dari jumlah tersebut terbagi dalam Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Darat China (*PLA Ground Force*) memiliki personil dengan jumlah 1.600.000 orang yang didukung dengan perlengkapan canggih seperti Tank yang berjumlah 9.150, Artileri 1.200 satuan, Helikopter 453 unit, meriam 10.000, peluncur roket sebanyak 4.000, senjata anti pesawat 1.531 dan senjata anti tank 8.000 unit. Sedangkan pada Angkatan udara (*PLA Air Force*) China memiliki personil sebanyak 330.000 orang, pesawat tempur 1.170 unit, pesawat penyerang 885 unit, pesawat pengangkut dan latihan 1142 unit, serta helikopter 856 . Begitu pula dengan Angkatan Laut China (*PLA Navy*) yang terdiri dari 255.000 personil, di dukung pula dengan 1 kapal induk, kapal selam 69 unit, kapal perusak 29 unit, Fregat 49, 39 kapal penyapu ranjau, dan 368 kapal pertahanan pantai. Tidak hanya sampai di situ Tiongkok masih memiliki angkatan Cadangan (*Second Artillery Force*) yang berjumlah 100.000 personil dan didukung dengan 66 rudal balistik, 118 rudal balistik

jarak menengah, 204 rudal balistik jarak pendek, dan 54 rudal jelajah.

ASEAN dan Tiongkok setuju untuk merampungkan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan DOC pada Juli 2011 pada pertemuan Menteri Luar Negeri Tiongkok - ASEAN. Kedua belah pihak berhasil menemui kata sepakat mengenai isu kesatuan ASEAN. Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN- Tiongkok yang diselenggarakan pada November 2011, menyatakan bahwa Tiongkok berniat untuk terus menjadi tetangga yang baik, teman baik, dan mitra yang baik bagi ASEAN. Tiongkok berniat untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk melaksanakan DOC secara keseluruhan.

Tiongkok berupaya untuk menguasai Laut China Selatan, karena potensi hasil lautnya dan juga merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan negara di Asia Tenggara, serta kepentingan negara Jepang dan Korea Selatan, dan Amerika terlibat dalam melindungi negara-negara sekutunya di Asia, seperti Singapura, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Namun Indonesia juga termasuk berbatasan dengan Laut China Selatan.

Sementara itu Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan juga berpotensi menjadi Negara *Regional Powers* Tiongkok mengingat pertumbuhan ekonomi dan angkatan bersenjata Indonesia yang sudah mulai berkembang, walaupun Indonesia negara yang tidak memiliki aliansi dengan negara-negara adidaya lainnya. Namun dengan jumlah penduduk dan angkatan perang begitu besar bisa menjadi ancaman secara tidak langsung bagi kepentingan Tiongkok di Laut China Selatan.

Daftar Pustaka

- Acharya, Amitav. 2001. *Construsting a Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Cooley, Brendan A *Sea Change or a Wave of Backlash? The South China Sea and Changing Power Dynamics in Southeast Asia*, *Global Security Studies*, Fall 2012, Volume 3, Issue 4, tth,
- Cooley, Brendan A *Sea Change or a Wave of Backlash? The South China Sea and Changing Power Dynamics in Southeast Asia*, *Global Security Studies*, Fall 2012, Volume 3, Issue 4, tth, h. 85
- Dewi, Rosita dan CPF Luhulima, "Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan"
- For a discussion of Sino-Russian strategic balance in Central Asia, see Stephen J. Blank, "Who's Minding the Store?: The Failure of Russian Security Policy," *Problems of Post-Communism*, Vol. 45, No. 2 (March-April 1998)
- Goh Evelyn. (*Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, 2005*), *East-West Center Washington*,
- Harini, Setyasih (Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan: artikel Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unsri Surakarta, 2015),
- Harini, Setyasih *Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut China Selatan*,
- Holsti, K.J. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis: Sixth Edition*, New Jersey: Prentice-Hall International Editions..
- Hunt, Katie China to narrow gap with U.S. by increasing military spending, CNN, (March 5, 2015), <http://edition.cnn.com/2015/03/05/asia/china-military-spending/>, Akses 24 April 2017
- Kaldor, Mary & Rangelov. 2014. *The Handbook of Global Security Policy (ed.)*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Kaplan, Robert D. *Asia's Cauldron, The South China Sea and the end of a stable pacific*, (The United States, New York, Random House, 2014), h. 40
- Lo, Chi Kin 1989. *China's policy Toward Teritorial Dispute*. New York: Routledge.
- Locklear III, Samuel J.: "Kami Tak Pernah Meninggalkan Asia-Pasifik," *Koran Tempo*, 18 Pebruari 2013: A14
- Raine, Sarah and Miere, Christian Le *Regional Disorder: the South China Sea Dispute, The International Institution for Strategic Studies*, The United Kingdom, London: Routledge 2013,
- Rourke. 2003. *International Politics on the World Stage*. New York: McGraw-Hill/Dushkin.
- Sheehan, Michael. 1996. *The Balance of Power: History and Theory*. New York: Routledge.
- Simela Victor Muhammad (Kepentingan China dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan: Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV No. 08/II/P3DI/April /2012)
- STRATEGIC ANALYSIS, *A strategic analysis of the South China Sea territorial issues*, Jurnal,
- Suharna, Karmin, SIP., MA (Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi Ketahanan Nasional: *Majalah Komunikasi dan Informasi edisi 94 tahun* , 2012),.

- Thayer, Carlyle A. ASEAN, China and the Code of Conduct in the South China Sea, Published by The Johns Hopkins University Press DOI: 10.1353/sais.2013.0022
- Vuving, Alexander L. *Vietnam, The United States, And Japan In The South China Sea*, Paper for the Workshop on “U.S.-Japan Relations and Maritime Security in the East and South China Seas” at Meiji University, Tokyo, 22 October 2014,
- Welch, David A., The diplomat, China’s curious South China Sea negotiation policy, <http://thediplomat.com/2016/06/chinas-curious-south-china-sea-negotiation-policy/>
- Wu, Shicun dan Zou, Keyuan “Securing the Safety of Navigation in East Asia: Seeking a Cooperative Mechanism” dalam Shicun Wu dan Keyuan Zou, *Securing the Safety of Navigation in East Asia*, UK: Chandos Publishing, 2013,
- Sumber Internet**
- Academia. 2017 *Postur Kekuatan Militer Negara Filipina* Tersedia di http://www.academia.edu/11934086/POSTUR_KEKUATAN_MILITER_NEGARA_FILIPINA diakses tanggal 12 Februari 2017
- Aryani, Setyaningsih, *Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan*, Tersedia di <https://sidos.unisri.ac.id/publikasi/69Jurnal%20China>, diakses terakhir pada 13 September 2016
- East Asia Forum. 2016 *China Militant Tactics in the South China Sea* Tersedia di <http://www.eastasiaforum.org/2011/06/29/china-s-militant-tactics-in-the-south-china-sea/>, diakses tanggal 15 Januari 2015
- Eia GOV. 2008 *US Energy Information and Administration, South China Sea*, Tersedia di www.eia.gov, *US Energy Information and Administration, South China Sea*, 2008, diakses tanggal 24 Mei 2016.
- Foreign Policy. 2016 *The South China Sea Is the Future of Conflict* Tersedia di www.foreignpolicy.com, Robert D Kaplan, *The South China Sea Is the Future of Conflict*, diakses tanggal 24 Mei 2016.
- Koran Tempo. 12 Juli 2016 *Sengketa Kawasan Laut China Selatan* Tersedia di <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/12/118787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-China-selatan> diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Kyoto Review. 8 Agustus 2015 *Isu Keamanan di Laut China Selatan* Tersedia di <https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-China-selatan-dari-doc-ke-coc/> diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Magazine Center. 1 Desember 2016 *Bentrok Antara Vietnam Dan Tiongkok* Tersedia di <http://apdf-magazine.com/id/vietnam-menyiapkan-pasukan-untuk-kemungkinan-bentrok-dengan-Tiongkok/> diakses tanggal 23 Januari 2016
- Media Indonesia. 2016 *Subtansi Putusan permanent court arbitration* Tersedia di <http://mediaindonesia.com/news/read/55880/substansi-putusan-permanent-court-of-arbitration/> diakses tanggal 14 Oktober 2016
- Koran Republika. 2016 Tersedia di Republika.co.id/berita/internasional/global/14/05/14/n5kc8v-massa-antiChina-bakar-15-pabrik-di-

vietnam#”, diakses pada tanggal 23
Januari 2015